

BAB II

KEMUNCULAN *EUROMAIDAN*

Persaingan hegemoni poros Barat dan Timur dalam upaya menjadikan Ukraina sebagai wilayah strategis perihal penyebarluasan skema kebijakan transnasional mereka, ikut memberikan andil dalam mempengaruhi keutuhan bangsa Ukraina. Situasi ini pada akhirnya menimbulkan konflik internal bagi Ukraina yang membagi opini publik kedalam dua prinsip yang saling berkontradiksi. Kemudian, dengan diiringi pergantian rezim pemerintahan, perbedaan prinsip tersebut ikut menyertai prosesi politik terburuk namun paling revolusioner sepanjang sejarah kemerdekaan Ukraina.

Titik awal *Euromaidan* bermula dari munculnya demonstrasi di wilayah Distrik Lypky, Kiev yang berlangsung sejak keputusan Yanukovych pada akhir bulan November tahun 2013. Puncak dari demonstrasi terjadi pada 20 Februari 2014, para demonstran menggelar aksinya dengan mengelilingi Gedung Parlemen Ukraina (*Verkhovna Rada*) dengan situasi yang terbilang kondusif pada awalnya. Namun, kondisi ini berubah ketika diturunkannya pasukan spesial polisi anti huru-hara “Berkut” sebagai bentuk pembubaran paksa, banyak kesaksian yang menyatakan bahwa tindakan aparat kala itu terkesan agresif dan represif. Cakupan demonstrasi meluas hingga berubah menjadi seruan agar Presiden Viktor Yanukovych untuk segera mengundurkan diri. Pada 18 Februari tahun 2014, peserta aksi *Euromaidan* yang berjumlah sekitar 20.000 orang berunjuk rasa di gedung Parlemen Ukraina dengan membawa tuntutan pemulihan Konstitusi Ukraina 2004.

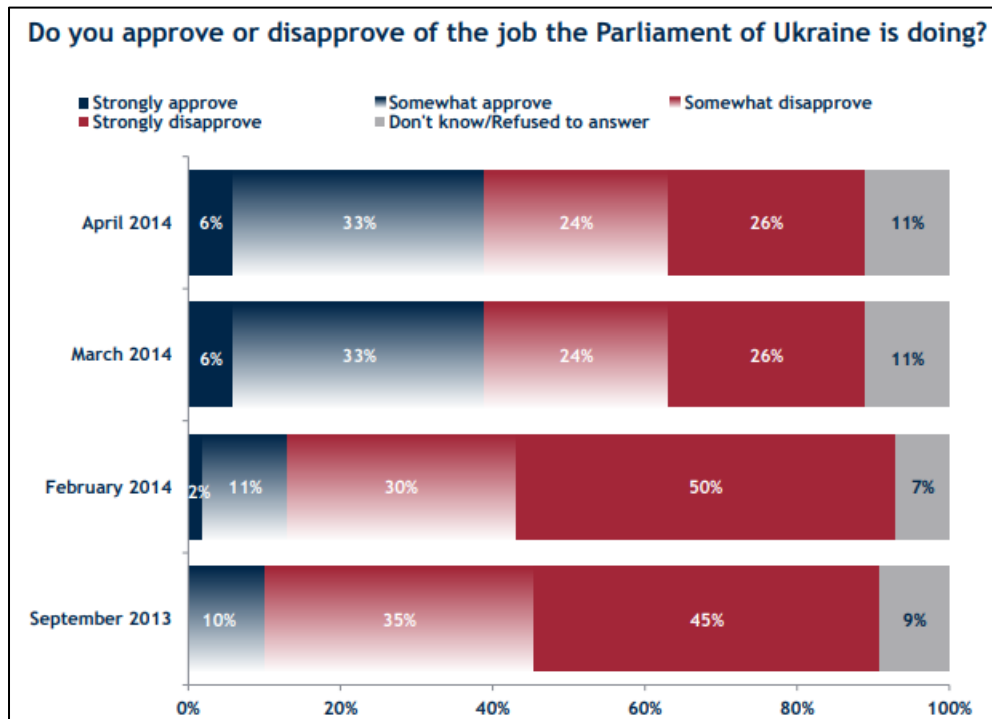
Aparat mulai menembakan senapan, baik senapan berpeluru karet ataupun timah selain itu gas air mata dan juga granat kilat juga menjadi senjata dalam upaya mengusir ribuan peserta demonstrasi. Bentrokan paling parah terjadi di Mariinsky Park, Hrushevskoho, Institutska Street dan Shovkovychna Street. Seiring dengan situasi yang dirasa semakin ricuh, peserta aksi demonstrasi dipukul mundur oleh aparat hingga ke Lapangan Kemerdekaan (*Maidan Nezalezhnosti*). Dengan lokasi demonstrasi yang berpindah tempat, tidak serta-merta membuat kondisi menjadi kondusif, sebaliknya kerusuhan semakin menjadi besar dan bentrokan tidak dapat dihindarkan. Aksi demonstrasi yang berlangsung sejak November tahun 2013 hingga Februari tahun 2014 secara keseluruhan menewaskan 120 orang yang terbagi kedalam; 103 orang pengunjuk rasa dan 17 orang aparat penegak hukum (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 2013: 3).

Tanggal 19 Februari 2014, pemeriksaan polisi, pembatasan transportasi umum, dan penutupan sekolah-sekolah diperintahkan oleh pihak berwenang di Kiev, yang memicu diberlakukannya status darurat nasional. Di hari yang sama, Menteri Dalam Negeri Ukraina, Vitaliy Zakharchenko, mengumumkan bahwa ia telah menandatangani dekret yang mengizinkan penggunaan amunisi terhadap para demonstran. Namun keesokan harinya, Pemimpin *Verkhovna Rada* Volodymyr Rybak menandatangani dekret parlemen, yang mengutuk penggunaan angkatan bersenjata dan mendesak semua lembaga—Kementerian Dalam Negeri, Menteri Kabinet, dan sebagainya untuk segera menghentikan seluruh tindakan militer terhadap para demonstran.

2.1. Kegagalan Rezim Viktor Yanukovych

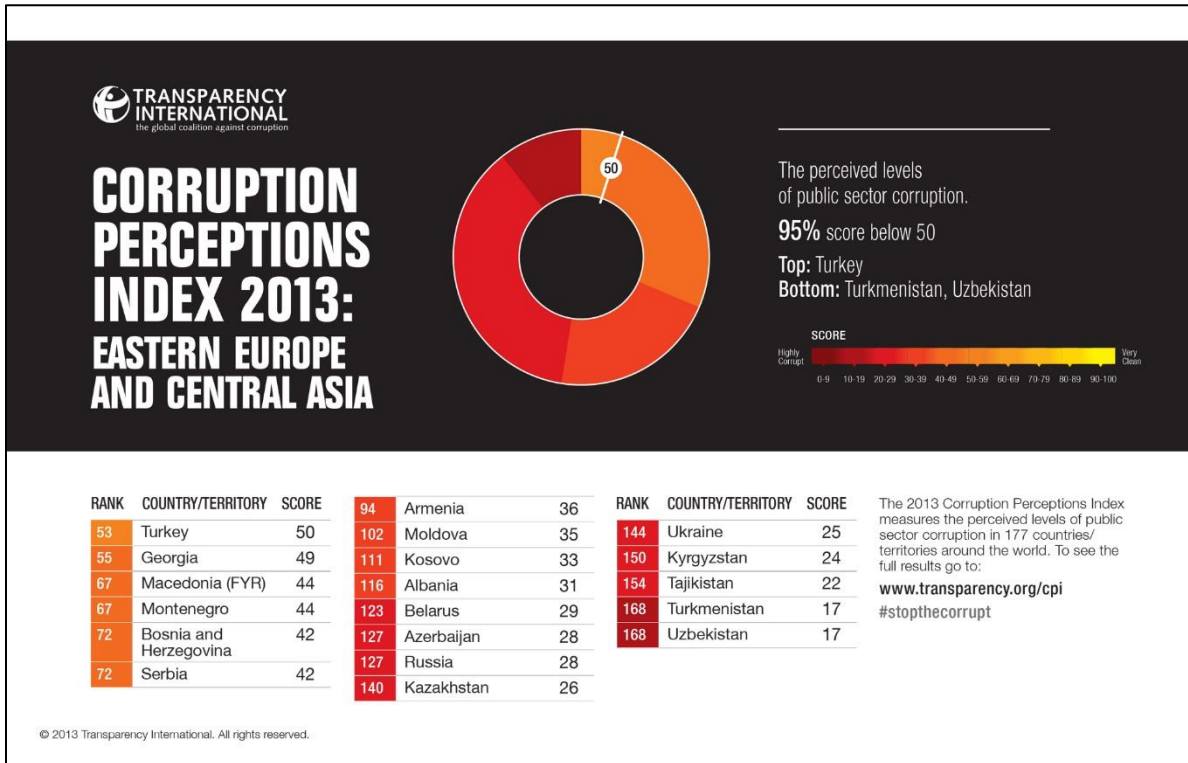
Euromaidan merupakan salah satu titik paling kritis dalam perkembangan sistem politik sejak Ukraina merdeka. Baik koalisi poros Barat, media internasional, hingga opini publik Ukraina menghadirkan *Euromaidan* sebagai revolusi demokratis sebagai upaya untuk menggulingkan rezim boneka Viktor Yanukovych. Segala jenis kasus kekerasan yang terjadi selama *Euromaidan* seakan menggambarkan sifat pemerintahan Viktor Yanukovych yang tidak demokratis, berhaluan otoriter, dan represif. Sebuah survei dalam jurnal internasional yang diterbitkan oleh *International Foundation for Electoral Systems* pada tahun 2013 menyatakan sikap pesimisme atas kondisi Ukraina yang cenderung negatif—berkaitan dengan ekonomi sosial politik dan keamanan. Dari 1.517 masyarakat Ukraina yang menjadi responden, sebanyak 58% suara berpendapat bahwa Ukraina sedang menuju ke arah ketidakstabilan, sementara hanya 14% suara yang percaya bahwa stabilitas telah tercapai di Ukraina. Hasil survei tersebut mengalami peningkatan angka yang signifikan dari tahun 2012, terutama di wilayah Ukraina bagian Timur dan Selatan (*International Foundation for Electoral Systems*, 2013).

Survei lainnya yang diterbitkan oleh *International Republican Institute* pada tahun 2014 menyatakan bahwa sebagian besar responden tidak mendukung dan tidak menyetujui kinerja yang telah dilakukan oleh Parlemen Ukraina pada akhir tahun 2013 hingga awal tahun 2014. Data menunjukkan bahwa dari 1.200 responden, 45% suara menyatakan ketidakpuasannya atas kinerja Parlemen Ukraina pada survei bulan September tahun 2013, sementara hanya 10% saja yang sedikit puas atas kinerja parlemen. Angka ini mengalami peningkatan pada survei yang dilakukan 5 (lima) bulan selanjutnya, dimana 50% suara dari 1.200 responden menyatakan kekecewaan yang sama terhadap kinerja Parlemen Ukraina (*International Republican Institute*, 2014).



Grafik 1.1 Hasil Survei Opini Publik Terhadap Kinerja Parlemen Ukraina Tahun 2013–2014 (Sumber: International Republican Institute, 2014)

Rendahnya tingkat konsolidasi pemerintah terhadap isu-isu sentral Ukraina secara signifikan melemahkan pembangunan nasional secara menyeluruh. Proses modernisasi negara tidak sejalan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat Ukraina, privatisasi aset-aset yang dinasionalisasikan tidak terjangkau pengaruhnya oleh rakyat. Pemerintah Ukraina dapat didefinisikan hanya sebagai sebuah instrumen untuk mendistribusikan aset-aset ini bagi kalangan tertentu—sistem yang sarat dengan oligarki, korupsi, kolusi dan nepotisme. Laporan *Corruption Perceptions Index* (CPI) di tahun 2013 yang diterbitkan oleh *Transparency International* menyatakan bahwa situasi untuk menjalankan bisnis jangka panjang bagi investor asing di Ukraina telah memburuk secara signifikan, alasan utamanya adalah terciptanya skema proteksionisme korup yang dipadukan dengan kepentingan politik dan bisnis rezim Viktor Yanukovych. Laporan CPI juga menerangkan bahwa peringkat Ukraina dalam isu korupsi praktis tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Ukraina di tahun 2013 berada di peringkat 144 dari 177 negara—peringkat 177 didefinisikan sebagai negara yang paling korup (Tymchenko, 2013).



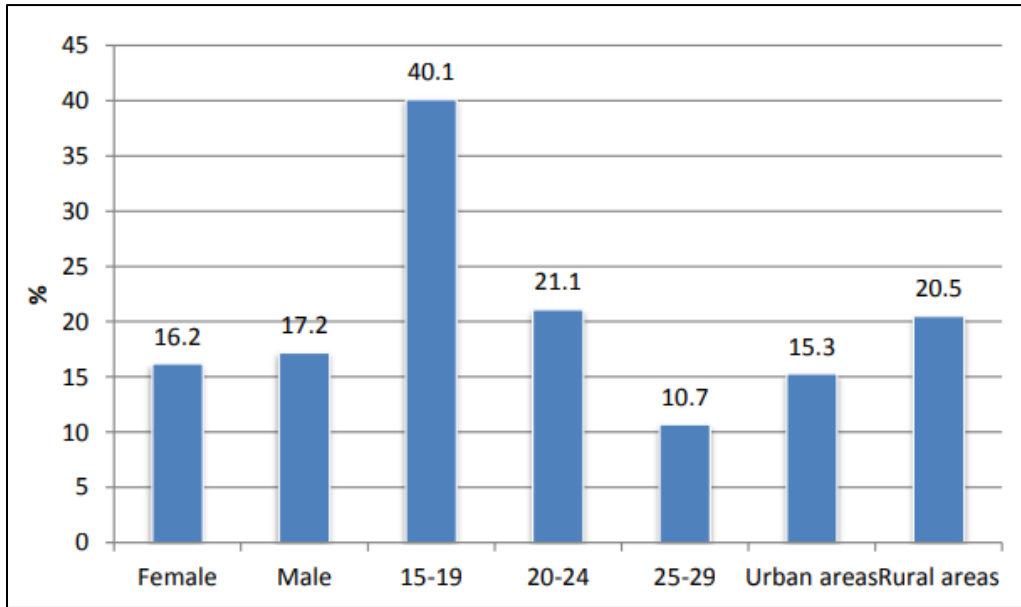
Gambar 1.1 Corruption Perceptions Index Tahun 2013 Menunjukkan Ukraina Berada di Peringkat 144 Dari 177 Negara (Sumber: Transparency International, 2013)

Angka korupsi yang cukup tinggi di Ukraina sejatinya ikut mengiringi kebobrokan pembangunan nasional di Ukraina. Masalah dasar komunitas perindustrian di Ukraina bukan hanya tidak diberikan solusi yang tepat oleh pemerintah tetapi juga diperburuk. Sedikitnya terdapat 3 (tiga) alasan utama isu ini santer terdengar di rezim Viktor Yanukovych, ketiganya;

1. Monopoli bisnis. Klan oligarki secara aktif mendistribusikan kembali sumber daya bisnis di antara kalangan mereka sendiri, sehingga menghilangkan transparansi dan daya saing yang sehat dari pasar.
2. Kegagalan perencanaan bisnis jangka panjang yang merata. Sekali lagi, oligarki memainkan peran dalam poin ini. Investor yang tidak memiliki kedudukan di mata pemerintahan dipersulit dalam memproyeksikan bisnis jangka panjang mereka (eg. *real estate*, industri skala besar, dan sejenisnya).
3. Korupsi yang menjalar. Prosedur pemberlakuan izin untuk melakukan kegiatan industri dipersulit, praktek korupsi berkembang dalam otoritas negara hingga pejabat pengambil keputusan.

Monopoli bisnis yang telah mengakar di Ukraina, menjadikan negara ini tidak bisa melakukan bisnis internasional di bawah standar dunia. Dengan sedikitnya investor asing, otomatis banyak perusahaan-perusahaan menengah kebawah yang mengalami pailit akibat akuisisi perusahaan besar yang dimiliki oligarki Ukraina yang tidak sedikit menggunakan ancaman. Meskipun bukan merupakan faktor tunggal, terkait isu ini kondisi lapangan pekerjaan di Ukraina mengalami situasi yang mengkhawatirkan. Tingkat pengangguran kaum muda Ukraina menyentuh angka 16,8% dari jumlah penduduk, angka tersebut didapatkan dari berbagai macam kelompok demografis pemuda yang berbeda. Usia dan daerah tempat tinggal memainkan peran yang besar dalam mempengaruhi tingkat pengangguran. Pemuda dengan usia 15–19 tahun merupakan rentang usia yang paling sulit untuk mendapatkan pekerjaan, bahkan untuk pekerjaan paruh waktu (*part-time job*). Hal ini menegaskan bahwa pemuda yang tidak memiliki gelar—mayoritas pemuda berumur 15–19 tahun tidak memiliki akses untuk dapat melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi—ataupun pelatihan profesional dan kualifikasi yang rendah memiliki masalah dalam mencari pekerjaan (Libanova, Cymbal, dkk., 2014: 29).

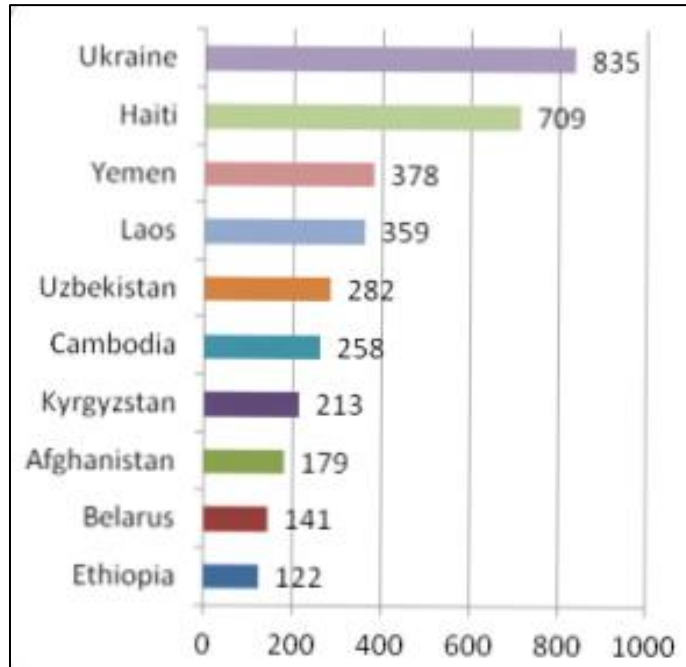
Stabilitas dalam negeri merupakan kepentingan nasional yang utama untuk diselesaikan. Kesejahteraan rakyat yang terancam, perpolitikan dalam negeri yang keruh, dan juga ancaman intervensi asing terhadap kedaulatan negara, mengharuskan Ukraina untuk mengesampingkan aspek moralitas dan kedudukannya dalam sistem politik internasional. Sulitnya untuk mendapatkan lapangan pekerjaan akan mengurangi dan memperkeruh arus integrasi nasional Ukraina yang semakin pudar, belum lagi tingkat kenyamanan fasilitas yang berbeda diantara masyarakat kota dan pedesaan Ukraina. Berdasarkan Grafik 1.2 perbedaan gender antara pria dan wanita dalam angka pengangguran tidak memainkan peran yang signifikan. Namun, apabila dilihat dari usia, pemuda dengan rentang usia 20–24 tahun lebih banyak menemui kesulitan dalam mencari pekerjaan ketimbang pemuda dengan rentang usia 25–29 tahun. Dalam Grafik 1.2 juga menekankan bahwa persentase pengangguran yang bermukim di wilayah pedesaan lebih banyak jumlahnya ketimbang di wilayah perkotaan, hal ini menandakan bahwa tidak meratanya industrialisasi berskala nasional. Situasi ini nantinya akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi domestik, ketimpangan sosial antara masyarakat kelas atas–kelas bawah, kemiskinan yang tidak terkendali, hingga kejahatan dan kekerasan yang terbentuk sejak dini di kalangan usia muda.



Grafik 1.2 Persentase Tingkat Pengangguran di Ukraina Berdasarkan Gender, Usia, dan Daerah Tempat Tinggal (Sumber: Libanova, Cymbal, dkk., 2014)

Seakan mengiringi keterpurukan masyarakat dengan sulitnya untuk mencari lapangan pekerjaan, Ukraina merupakan salah satu negara di Eropa Timur yang memiliki tingkat kejahatan terorganisir paling tinggi. Jenis-jenis kejahatan terorganisir ini meliputi; penyelundupan narkoba, penyelundupan tembakau, perdagangan manusia, pemalsuan dan perdagangan barang gelap, pembunuh dan penculik bayaran, kejahatan siber, akuisisi perusahaan secara paksa—seperti yang telah disinggung sebelumnya, hingga perdagangan senjata gelap (Organized Crime Observatory, 2015). Situasi ini secara langsung menyelimuti kekhawatiran masyarakat Ukraina, terutama masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah kebawah. Pasalnya, keamanan individu termasuk kedalam salah satu kewajiban negara yang tidak ditangani dengan baik oleh pemerintah Ukraina. Untuk itu, upaya mempersenjatai diri sendiri hingga menggunakan jasa pengawal pribadi merupakan hal yang lumrah terjadi di Ukraina. Sebuah kejahatan terorganisir tentunya akan dinilai sangat berbahaya apabila dapat mengancam keamanan mayoritas masyarakat secara dekat dan langsung. Dengan tidak mengesampingkan urgensi nasional perihal pemberantasan kejahatan terorganisir lainnya yang telah disebutkan sebelumnya, perdagangan manusia memiliki andil besar dalam membawa ketakutan bagi mayoritas masyarakat Ukraina menengah kebawah yang notabene tidak memiliki sumber proteksi keamanan yang memadai.

Korban dari perdagangan manusia bervariasi mulai dari gender hingga usia yang berbeda-beda, *the International Organization for Migration (IOM)* menempatkan Ukraina sebagai negara teratas dengan masalah perdagangan manusia. Pada tahun 2011 saja, IOM sedikitnya menangani 835 kasus yang berkaitan dengan perdagangan manusia di Ukraina (*International Organization for Migration, 2012*).



Grafik 1.3 Jumlah Kasus Perdagangan Manusia Berdasarkan Negara di Tahun 2011 (Sumber: International Organization for Migration, 2012)

Ukraina merupakan salah satu negara yang menjadi sumber manusia, wilayah transit, dan wilayah tujuan bagi perdagangan manusia berskala global. Para individu yang menjadi korban perdagangan manusia mayoritas diperdagangkan dengan tujuan kerja paksa sebagai buruh berupah rendah–tidak dibayar sama sekali hingga pekerja seks komersial. Alasan utama mengapa isu ini masih santer terdengar di Ukraina adalah kegagalan rezim Viktor Yanukovych dalam membangun sumber daya yang cukup dalam upaya menyelidiki dan juga melindungi para korban perdagangan manusia. Dewasa ini persepsi ancaman keamanan tidak sebatas hanya dapat dikaitkan dengan integrasi teritorial ataupun kedaulatan negara saja, bukan kedua faktor tersebut berkurang intensitas kepentingannya, namun perluasan cakupan definisi ancaman keamanan perlu diterapkan khususnya bagi negara-negara berkembang seperti Ukraina. Keselamatan individu dari tindakan kejahatan, keterbatasan akses dalam memenuhi kebutuhan pokok, degradasi kualitas hidup dan perekonomian memainkan perang penting dalam isu keamanan yang modern.

Isu pokok keamanan kontemporer bukan hanya terbentuk melalui ancaman eksternal—intervensi militer oleh suatu negara terhadap negara lain, namun isu sosial seperti konflik masyarakat mayoritas–minoritas, monopoli sumber daya oleh segelintir kalangan tertentu, krisis legitimasi dalam tubuh pemerintahan, kemiskinan, hingga kejahatan terorganisir ikut menjadi faktor ancaman keamanan bagi sebuah negara. Setelah Perang Dingin usai dan terpecahnya Uni Soviet, lahir 4 (empat) kecenderungan baru dalam isu keamanan modern; yang pertama, bahwa kekuatan persenjataan tidak lagi merupakan faktor tunggal yang menjamin keamanan negara. Selanjutnya, isu keamanan tidak dapat diselesaikan secara tuntas apabila hanya mengandalkan pemerintah nasional saja, namun diperlukan kerjasama di tingkat masyarakat, regional hingga global. Kemudian, ancaman terhadap negara bukan menjadi satu-satunya isu keamanan, tetapi juga harus memperhitungkan aspek keamanan individu warga negara—menyangkut isu ekonomi, sosial, politik dan keamanan individu dari kejahatan. Lalu yang terakhir, faktor non-militer memiliki pengaruh yang signifikan dalam menciptakan stabilitas dan keamanan dalam negeri (Renner, 2005)

Keterpurukan Ukraina dibawah pemerintahan Viktor Yanukovych membuktikan bahwa redefinisi ancaman keamanan dalam sistem perpolitikan kontemporer yang telah disinggung sebelumnya tidak terbantahkan. Akan tetapi, isu-isu yang lahir di Ukraina selama rezim Viktor Yanukovych perlu mendapatkan pemicu agar isu-isu tersebut dapat dinyatakan sebagai urgensi berskala nasional. Ole Waeber memberikan pandangan bahwa suatu ancaman dapat dikategorikan sebagai ancaman keamanan nasional apabila terciptanya sebuah pernyataan (*speech act*) yang dapat diterima oleh publik secara luas. Ole Waeber berpendapat bahwa dengan menyatakan ancaman keamanan sebagai sebuah pernyataan yang dapat diterima oleh publik, maka sekuritisasi keamanan tidak hanya dikategorikan sebagai sebuah proses konstruksi sosial, akan tetapi juga dapat melahirkan pelaku keamanan (*securitizing actor*) di kalangan masyarakat sipil secara luas. Berangkat dari pemahaman bahwa suatu isu yang dikategorikan sebagai ancaman keamanan dapat tercipta melalui sebuah pernyataan (*speech act*), maka isu keamanan tidak lagi menjadi hak eksklusif pemerintah negara, akan tetapi aktor-aktor non-negara juga dapat berkontribusi dalam mendefinisikan suatu isu menjadi sebuah ancaman keamanan atau tidak. Situasi ini menempatkan aktor-aktor non-negara tersebut tetap memiliki peluang untuk memberikan pernyataan kepada pemerintah agar mengambil tindakan di luar kebiasaan dalam mengatasi ancaman keamanan.

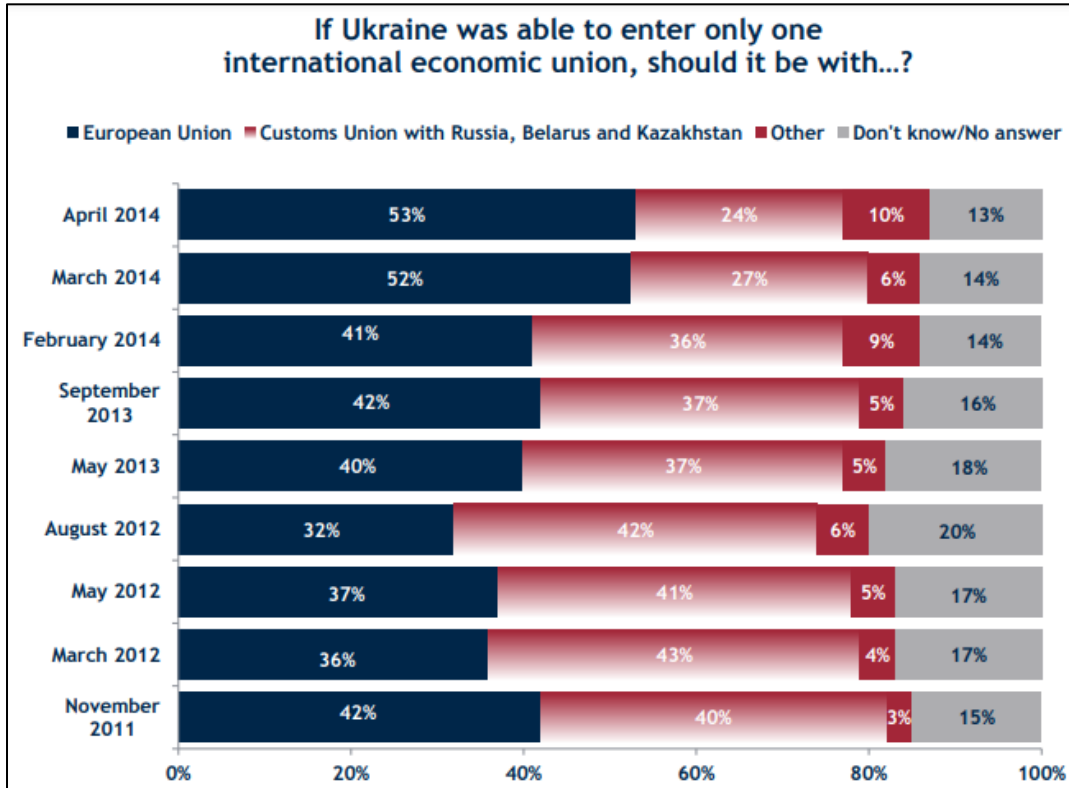
Sebagai pemicu pernyataan (*speech act*) kepada publik nasional, *Euromaidan* hadir di Ukraina sebagai sarana kekecewaan masyarakat atas ancaman non-militer—ketidakmampuan pemerintah dalam menjamin kesejahteraan masyarakat yang berlangsung dibawah rezim Viktor Yanukovych. Kondisi masyarakat yang muak dengan situasi sarat korupsi di tubuh pemerintahan, inefisiensi pemerintah dalam menangani keamanan individu, hingga stagnasi ekonomi dan sosial di Ukraina membuat *Euromaidan* dapat diterima secara mayoritas. Dengan kesatuan tujuan yang muncul, momentum *Euromaidan* diciptakan sebagai sebuah instrumen reformasi dalam mengelaborasi visi strategis Ukraina di masa depan. Sedikitnya terdapat 5 (lima) poin utama tuntutan *Euromaidan* berkaitan dengan sekuritisasi keamanan non-militer di Ukraina selama rezim Viktor Yanukovych (Klychko, 2014), kelimanya yaitu;

1. *Euromaidan* menuntut agar aparat sipil negara memainkan peran secara efektif dan akuntabel. Hal ini menjadi faktor utama pemberantasan korupsi berskala masif dapat diterapkan secara sukses. *Euromaidan* berencana untuk mencapai tujuan ini melalui pemecatan hubungan kerja kepada para pegawai negeri sipil yang terlibat dalam praktik korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan dalam rezim Viktor Yanukovych. Reformasi sistem peradilan yang nyata yang diinisiasi melalui pembentukan badan-badan penegak hukum anti-korupsi perlu diterapkan agar tuntutan dapat efektif secara berkelanjutan.
2. *Euromaidan* menuntut agar pemerintah menciptakan ruang lingkup yang bersahabat terhadap investor—termasuk investor asing dengan mereformasi kebijakan ekonomi dan sistem administrasi yang transparan, sehingga meminimalisir kesepakatan yang hanya melibatkan beberapa kalangan tertentu.
3. *Euromaidan* menuntut agar pemerintah lebih fleksibel dalam menciptakan hubungan bisnis dengan pengusaha lokal menengah kebawah. Kemitraan yang terjalin akan menciptakan pembangunan negara secara merata, namun pemerintah perlu menjamin hak milik dan kontrak, memastikan perlakuan yang sama dengan kemitraan asing, dan menetapkan pajak atas dasar non-diskriminatif.

4. *Euromaidan* menuntut agar pemerintah segera untuk mengatasi kebobrokan infrastruktur yang berkaitan dengan konsumsi publik (ie. jalan raya, pemerataan jaringan komunikasi, internet, kebebasan pers, dan sejenisnya). Pengadaan barang-barang konsumsi publik harus diperbarui secara radikal dengan meninggalkan kebijakan-kebijakan pemerintahan yang lama. Efisiensi energi dalam hal ini perlu dicapai, agar Ukraina bebas dari konsumsi energi yang berlebihan.

5. *Euromaidan* menuntut pemerintah untuk menjalankan pembangunan manusia (*human development*) yang berkelanjutan terutama dalam aspek individu—keamanan ekonomi, sosial, politik, keamanan dari segala macam bentuk tindak kejahatan, keamanan untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga normal, dan lapangan pekerjaan. Situasi kritis dalam isu ini dapat pemerintah ubah dengan menerapkan skema yang modern serta meningkatkan alokasi dana.

Program reformasi yang lahir dalam momentum *Euromaidan* menurut Klychko (2014) sesuai dengan harapan apabila Viktor Yanukovych tidak membatalkan penandatanganan *Ukraine–European Union Association Agreement* seperti yang telah dibahas sebelumnya. Krisis Ukraina memungkinkan akan mengubah arah hubungan luar negeri Ukraina dengan Uni Eropa di tahun-tahun mendatang, mayoritas masyarakat Ukraina memandang bahwa masa depan Ukraina yang terikat dengan integrasi Uni Eropa dapat mereformasi dan memodernisasikan sistem oligarki yang telah mengakar. Pembatalan penandatanganan *Ukraine–European Union Association Agreement* seakan mengindikasikan kemunduran sistem demokrasi Ukraina yang terbelenggu totalitarianisme. Mayoritas publik berharap penandatanganan *Ukraine–European Union Association Agreement* akan membentuk hubungan sosial, politik, ekonomi dan keamanan yang lebih baik bagi Ukraina dalam sistem politik internasional. Dalam survei yang diterbitkan *International Republican Institute* pada tahun 2014, dari 1.200 responden masyarakat Ukraina yang diwawancarai, sebanyak 42% suara menyatakan pendapatnya bahwa Ukraina lebih baik bergabung dengan Uni Eropa, sementara 37% berpendapat bahwa seharusnya Ukraina mempererat hubungannya dengan Serikat Pabean (*Customs Union*) bersama dengan Rusia (ie. survei pada bulan September tahun 2013) (International Republican Institute, 2014).



Grafik 1.4 Opini Publik Mengenai Arah Aliansi Politik Luar Negeri Ukraina (Sumber: International Republican Institute, 2014)

Mengacu dari Grafik 1.4 meskipun opini publik mengenai aliansi dengan Serikat Pabean bersama dengan Rusia memiliki persentase yang lebih besar sejak bulan Maret tahun 2012, situasi tersebut mengalami perubahan pada bulan Mei tahun 2013 hingga survei terakhir di bulan April tahun 2014 dimana publik berubah haluan kepada Uni Eropa.

2.2. Proxy War Dalam Perebutan Ukraina

Ukraina merupakan wilayah yang memiliki potensi besar dalam melahirkan sebuah konflik akibat pertentangan antara *major powers*, situasi ini menyebabkan tebelahnya masyarakat Ukraina kedalam dua sudut pandang yang saling berkontradiksi; Ukraina bagian Barat didiami oleh masyarakat pro-Barat sementara Ukraina bagian Timur ditempati oleh masyarakat pro-Rusia. Setidaknya terdapat tiga (3) pemicu mengapa Ukraina melalui revolusi *Euromaidan* menjadi ajang perebutan pengaruh antara Rusia dengan Barat:

1. Faktor pipa gas alam Ukraina–Rusia–Turkmenistan. Hingga pecahnya Uni Soviet di tahun 1991, jaringan pipa itu merupakan jaringan domestik. Saat ini, perdagangan gas antara Turkmenistan, Rusia dan Ukraina tidak hanya menjadi proposisi komersial, tetapi sebuah ilustrasi dependensi segitiga dari ketiga negara. Isu-isu kunci dalam hal transit ekspor gas ke Turkmenistan di luar Asia Tengah melewati Rusia, yang akhirnya dikendalikan secara penuh dari sekitar tiga perempat ekspor Turkmenistan. Dan posisi Rusia berhadapan dengan Ukraina sangat rentan karena sekitar 66% ekspor gas Rusia ke Eropa melewati Ukraina. Dengan demikian, Ukraina adalah titik transit sekaligus titik penghambat bagi ekspor gas Rusia. Pada tahun-tahun awal pecahnya Uni Soviet, terjadi gangguan serius ketika Ukraina melanggar kontrak gas dengan Rusia. Sejak saat itu pengiriman gas telah menjadi isu penting dalam hubungan politik dan keamanan antara Rusia dan Ukraina.
2. Semenanjung Krimea menjadi pelabuhan bagi Armada Laut Hitam Rusia yang masa sewanya diperpanjang selama 25 tahun pada tahun 2010 meskipun masih terdapat sengketa gas yang belum terselesaikan. Fasilitas ini menyokong Rusia dengan kemampuan militer strategis di daerah yang dianggap penting oleh Rusia bagi keamanan perbatasan dan pengaruh geopolitik. Sebagai imbalan untuk perpanjangan sewa, Rusia setuju untuk penurunan 30% dalam harga gas alam yang dijual ke Ukraina.
3. Ukraina merupakan pasar yang menjanjikan dari 45 juta konsumen potensial, dalam konteks di mana poros Barat dan Rusia berusaha untuk mendiversifikasi ekonomi dan membentuk skema tujuan ekspor mereka—ekspor barang, jasa, dan juga ideologi.

Revolusi *Euromaidan* membingkai suramnya skenario Ukraina yang terfragmentasi antara wilayah pro-Barat dan pro-Rusia. Fragmentasi ini semakin lebar sejak aksi *Euromaidan* karena sistem demokrasi konstitusional nampaknya tidak cukup meyakinkan para demonstrator sebagai *rules of the game* di Ukraina. Setelah melalui banyak perubahan kondisi, ekonomi Ukraina pernah turun dengan pendapatan perkapita berkisar \$3.200, lebih rendah sedikit dari Indonesia, setengahnya Cina, dan seperempatnya Rusia. Ukraina yang dilanda kerusuhan sejak November 2013 mendapatkan perhatian yang luas dari dunia karena pertentangan Barat dengan Rusia di wilayah ini.

Aliansi Barat dengan membawa simpatinya yang luar biasa terhadap krisis Ukraina acapkali mengganggu urusan internal Ukraina dengan menghasut partai/kelompok oposisi dengan melawan rezim yang berkuasa—Viktor Yanukovych. Di sisi lain, Rusia yang tak kalah simpatinya dengan saudaranya tersebut menginginkan agar Ukraina tidak bergabung dengan Uni Eropa atau aliansi skema kerja sama dengan Barat lainnya. Perbedaan pandangan antara Ukraina bagian Barat dan Timur sulit untuk didefinisikan dan nampaknya tidak ada yang dapat mengendalikan secara penuh perang saudara yang terjadi saat ini. Oleh karena itu, Kiev berusaha sekuat tenaga agar wilayahnya di bagian Timur Ukraina lainnya tidak menjadi seperti Krimea, yang menurut Kiev, dianeksasi oleh Rusia lewat referendum yang tidak sah.

2.3. Rusia Sebagai Aliansi Tradisional Ukraina

Kondisi Ukraina dimulai menjadi tidak menentu sejak Revolusi Rusia di tahun 1917. Hal ini kemudian diperburuk ketika terjadi Perang Ukraina–Soviet, dimana Tentara Merah berkuasa di akhir tahun 1919. Bolshevik Ukraina, mendirikan Republik Sosialis Soviet Ukraina pada 30 Desember 1922 dan menjadi salah satu bagian republik di Uni Soviet. Awalnya kebijakan pemerintah Soviet menetapkan bahasa Ukraina menjadi bahasa resmi di pemerintahan dan sekolah. Kebijakan tersebut diubah pada tahun 1930-an menjadi Rusia sebagai bahasa resmi. Pada tahun 1932 dan 1933, kelaparan melanda Ukraina, diperkirakan 4–5 juta orang Ukraina yang sebagian besar merupakan petani mati karena kelaparan, keterpurukan ini berlangsung hingga Nikita Khrushchev kemudian diangkat sebagai kepala Partai Komunis Ukraina pada tahun 1938.

Setelah invasi Polandia oleh Nazi Jerman dan Uni Soviet, Republik Sosialis Soviet Ukraina mendapat wilayah tambahan di sebelah barat. Ukraina diduduki oleh Nazi Jerman dari tahun 1941 sampai tahun 1944. Selama Perang Dunia II, Tentara Pemberontak Ukraina berjuang untuk pembebasan Ukraina melawan kepada Jerman maupun Uni Soviet. Setelah kematian Joseph Stalin, Ukraina bangkit selama Partai Komunis dari Uni Soviet dipimpin oleh Nikita Khrushchev, namun tetap saja terjadi represi terhadap kelompok masyarakat kelas bawah. Ukraina merdeka kembali setelah Uni Soviet bubar pada tahun 1991. Hal tersebut memulai periode transisi menuju sistem pasar bebas, di mana Ukraina mengalami resesi selama delapan tahun. Setelah itu, perekonomian Ukraina mengalami peningkatan pertumbuhan PDB. Ukraina terkena dampak krisis ekonomi dunia tahun 2008, hal ini yang menyebabkan PDB jatuh 20% dari tahun 2008 hingga tahun 2009.

Krisis Ukraina dimulai pada 21 November 2013, ketika presiden terdahulu Viktor Yanukovich menolak untuk menandatangani *Ukraine–European Union Association*. Keputusan ini mengakibatkan demonstrasi massal yang dikenal sebagai *Euromaidan*. Setelah berdemo selama beberapa bulan, Yanukovich berhasil dilengserkan oleh demonstran pada 22 Februari 2014. Kemudian kerusuhan berkembang di sebagian besar wilayah berbahasa Rusia di timur dan selatan Ukraina. Invasi Rusia ke Krimea menghasilkan aneksasi Krimea oleh Rusia pada 18 Maret 2014. Selanjutnya, kerusuhan di *oblast* Donetsk dan Luhansk berkembang menjadi sebuah perang antara pemerintah Ukraina dan pemberontak pro-Rusia.

2.4. Sengketa Krimea

Dimulai tanggal 26 Februari 2014, kelompok bersenjata pro-Rusia secara bertahap mulai mengambil alih semenanjung Krimea dan memprovokasi protes. Konflik berdarah di Kiev ternyata tidak usai setelah kejatuhan Viktor Yanukovich, persetujuan kepentingan Barat, Ukraina, dan Rusia menjaral hingga Semenanjung Krimea dan juga Ukraina bagian Timur yang menuntut diadakannya referendum untuk otonomi yang lebih luas hingga pemisahan diri dari Ukraina. Khusus di Krimea, persetujuan tersebut berubah menjadi seruan yang lebih luas hingga akhirnya terbentuk Republik Otonomi Krimea. Menurut catatan Dinas Statistik Ukraina, hingga 1 November 2013, penduduk Republik Otonom Krimea berjumlah 1,9 juta jiwa dengan komposisi lebih dari 50% merupakan orang Rusia, 24% orang Ukraina dan sekitar 12% campuran etnis. Terkait penggunaan bahasa, hukum Republik Otonom Krimea tidak membahas gagasan bahasa ‘negara’ atau bahasa ‘resmi’ untuk penduduknya. Oleh karena itu, baik bahasa Rusia maupun bahasa Ukraina digunakan sebagai bahasa resmi di wilayah ini. Menurut survei yang dilakukan oleh Institut Internasional Sosiologi di Kiev pada 2004, bahasa Rusia digunakan sebagai alat komunikasi oleh 97% penduduk Krimea. Meski secara *de jure* wilayah ini masih berada dibawah pemerintahan Ukraina, secara *de facto* Krimea berada dibawah pengaruh Rusia yang lebih besar. Krimea merupakan salah satu wilayah di Ukraina dengan persentase *Russophone* terbanyak di Ukraina—sekitar 60% dari jumlah penduduk. Selain disebabkan oleh faktor geografi yang berdekatan dengan Rusia, banyaknya warga keturunan Rusia yang mendiami wilayah Krimea disebabkan oleh faktor sejarah. Sebelum 1954, Krimea adalah *oblast* di bawah administrasi Rusia. Namun, pemimpin Uni Soviet saat itu, Nikita Khrushchev, menjadikan wilayah Krimea sebagai bagian dari Ukraina.

Krimea juga menjadi lokasi strategis tempat ditambahkannya Armada Laut Hitam Rusia. Militer Rusia masih berada di Sevastopol karena di bawah Traktat Persahabatan dan Kemitraan Kiev–Moskow di tahun 1997, Rusia mengakui status kepemilikan Sevastopol dan kedaulatan Ukraina. Sebagai balasannya, Ukraina memberikan Rusia hak untuk terus menggunakan pelabuhan Sevastopol bagi armada laut Rusia hingga tahun 2017. Perjanjian awal izin Armada Laut Hitam di Sevastopol berlangsung untuk 20 tahun. Perjanjian ini otomatis diperpanjang lima tahun kecuali salah satu pihak membatalkannya. Perjanjian kedua, ditandatangani di Kharkiv tahun 2010, memperpanjang penggunaan pelabuhan Sevastopol untuk armada Rusia hingga 2042. Rusia membayar Ukraina \$98 juta per tahun untuk menyewa pangkalan laut ini, dan juga berdasarkan perjanjian Kharkiv, Rusia akan memberikan potongan harga gas alam \$100 per ton bagi Ukraina. Implikasi dari perkembangan situasi di Krimea mengakibatkan timbulnya pergerakan massa pro-Rusia yang semakin intensif khususnya di berbagai kota di wilayah timur Ukraina seperti: Kharkiv, Donetsk, Luhansk, Sloviansk, Odessa, Zaporizhzhia, dan Mykolayiv. Sebagian besar dari masyarakat pro-Rusia menuntut diadakannya referendum untuk penerapan negara federal Ukraina atau menggabungkan diri dengan Rusia. Pada 11 Mei 2014, separatis pro-Rusia di bagian timur Ukraina mengadakan referendum kemerdekaan meski pemerintah Ukraina di Kiev tidak mengakui referendum tersebut.

Para pemilih di kawasan Donetsk dan Luhansk, yang penduduknya sekitar 15% dari populasi Ukraina, memberikan suara dengan hasil sekitar 90% warga di kedua wilayah tersebut memilih untuk melepaskan diri dari Ukraina. Kiev membalas aksi separatisme tersebut dengan melancarkan operasi anti-teroris skala besar menghadapi separatis pro-Rusia bersenjata yang menimbulkan korban di kedua belah pihak. Hingga September tahun 2014, korban tewas dalam konflik Ukraina bagian Timur mencapai 3.543 jiwa, termasuk 298 korban pada kecelakaan pesawat Malaysia Airlines yang masih menjadi perdebatan. *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) menyatakan pada 27 Juni 2014 sekitar 110.000 orang telah melarikan diri dari Ukraina ke Rusia dan sekitar 54.400 warga Ukraina lainnya terpaksa mengungsi di dalam negeri Ukraina. Sementara data per September 2014, menyatakan jumlah pengungsi sudah mencapai lebih dari 275.000 orang. Pada tahun 2014, Ukraina dan separatis pro-Rusia telah menandatangani kesepakatan gencatan senjata di Minsk, Belarus. Pertemuan difasilitasi oleh Pemerintah Belarus dan dihadiri oleh perwakilan Rusia dan *Organization for Security and Co-operation in Europe*.

Parlemen Ukraina juga menetapkan undang-undang otonomi luas untuk kawasan Donetsk dan Luhansk. Undang-undang baru ini adalah bagian dari kompromi dengan kelompok separatis pro-Rusia. Selain itu, kawasan Timur diberikan hak untuk menyelenggarakan pemilu regional sendiri dan mendirikan pasukan keamanan di daerah-daerah otonomi. Para anggota separatis yang selama ini berperang melawan pasukan pemerintah akan mendapat amnesti, kecuali mereka yang terlibat dalam kejahatan besar. *Quid pro quo* dari undang-undang tersebut menuntut agar separatis pro-Rusia harus mencabut tuntutan untuk merdeka dari Ukraina. Meski terdapat gencatan senjata dan pembaharuan gencatan senjata secara penuh pada 20 September di tahun yang sama, kontak senjata masih terjadi dan menimbulkan korban sipil. Perkembangan ini sangat memprihatinkan karena pada dasarnya Ukraina dan Rusia adalah negara bersaudara yang saling membutuhkan. Dari data yang ada, etnis Rusia terbesar di negara pecahan Uni Soviet berada di Ukraina—sekitar 29,6% etnis Rusia dari total penduduk Ukraina berdasarkan sensus tahun 2001. Sedangkan warga Ukraina terbesar di luar Ukraina berada di Rusia—lebih dari 2 juta orang.

2.5. Kepentingan Nasional Rusia Terhadap Ukraina

Munculnya gerakan anti-Rusia di Kiev sejatinya dapat membahayakan kepentingan strategis Rusia di Ukraina, khususnya di Krimea dan Ukraina Timur, muncul ancaman keamanan di sekitar perbatasan terutama bagi etnis Rusia yang ada di Ukraina. Kemudian, dengan menghangatnya hubungan luar negeri Ukraina dengan poros Barat, maka akan menimbulkan ancaman strategis utama bagi ketahanan nasional dan juga eksistensi pengaruh Rusia di Ukraina. Intervensi awal yang dilakukan oleh Rusia di Krimea didasari alasan bahwa wilayah tersebut merupakan basis pertahanan utama Armada Laut Hitam Rusia. Kekuatan militer Rusia yang masih berada di Sevastopol di bawah Traktat Persahabatan, Kerja Sama dan Kemitraan Kiev–Moskow sejak tahun 1997 menjadi pemicu gerakan intervensi tersebut. Ukraina memberikan Rusia hak untuk terus menggunakan pelabuhan Sevastopol bagi Armada Laut Hitam Rusia hingga tahun 2017. Perjanjian awal izin Armada Laut Hitam di Sevastopol berlangsung untuk 20 tahun. Perjanjian ini otomatis diperpanjang lima tahun kecuali salah satu pihak membatalkannya. Perjanjian kedua, ditandatangani di Kharkiv tahun 2010, memperpanjang penggunaan pelabuhan Sevastopol untuk armada Rusia hingga 2042. Rusia membayar Ukraina \$98 juta per tahun untuk menyewa pangkalan laut di Krimea.

Berdasarkan perjanjian Kharkiv, Rusia akan memberikan potongan harga gas alam \$100 per ton bagi Ukraina. Rusia menggunakan pelabuhan Sevastopol selain tidak adanya wilayah lain di Rusia memiliki infrastruktur terbaik dalam menampung Armada Laut Hitam, juga untuk mengamankan pengaruh Rusia di wilayah lautan tersebut. Armada Laut Hitam Rusia terdiri dari 388 kapal perang Rusia, termasuk 14 kapal selam diesel. Selain itu, terdapat 161 jet tempur di pangkalan udara yang disewa Rusia di Gvardeyskaya dan Sevastopol. Total terdapat 25.000 personel militer Rusia di Krimea. Selain faktor geostrategis, juga terdapat pertimbangan ekonomi menyangkut Krimea; Pertama, Ukraina merupakan jalur transit pipa minyak dan gas alam bagi Rusia, apabila jalur tersebut bermasalah maka Rusia dapat mengalihkannya ke arah selatan (Laut Hitam) tempat Krimea berada. Kedua, Ukraina adalah salah satu produsen jagung dan gandum terbesar di dunia, sebagian besar wilayah produksi berada di Krimea. Berdasarkan data pemerintah Ukraina, lebih dari 50% ekonomi Krimea dikhususkan untuk industri pangan dan distribusi. Ketiga, wilayah Krimea dapat menjadi *choke point* dalam alternatif jalur pipa energi hidrokarbon dari Rusia.

Mengetahui arti strategis Krimea tersebut maka Rusia bergerak cepat ketika munculnya ancaman terhadap eksistensi mereka di Kiev. Pada 1 Maret 2014, parlemen Rusia menyetujui permohonan Vladimir Putin untuk penggunaan kekuatan militer di Ukraina. Putin mengatakan bahwa etnis Rusia dan Armada Laut Hitam Rusia di Krimea terancam oleh situasi konflik di Ukraina. Krimea berhasil dikuasai secara cepat oleh masyarakat pro-Rusia tanpa adanya pertumpahan darah. Selain karena faktor pemerintah pusat di Kiev yang masih sangat rapuh pasca tergulingnya Viktor Yanukovych, Rusia memiliki barak militer di Sevastopol dan mayoritas penduduk Ukraina di Krimea yang beretnis Rusia cenderung mendukung kegiatan pemerintah Rusia di wilayah tersebut. Dengan dukungan tersebut referendum pun dilakukan untuk menentukan masa depan Krimea apakah akan tetap berada dalam Ukraina dengan otonomi yang lebih luas atau menjadi negara yang berdaulat, meskipun seiring waktu referendum ini menimbulkan konflik yang lebih luas di wilayah ini. Lebih dari 90% rakyat Krimea memilih untuk bergabung dengan Rusia. Dengan demikian, referendum berjalan dengan sah, demokratis, sesuai dengan hukum internasional serta berjalan baik dan aman karena tidak adanya pertumpahan darah. Seiring dengan kondisi ini, Vladimir Putin menegaskan bahwa referendum diatur dalam hukum internasional, antara lain, secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) *International Covenant on Civil and Political Rights*:

“... all peoples have the right of self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social, and cultural development.”

Hasil dari referendum Krimea secara jelas menjelaskan bahwa deklarasi kemerdekaan suatu wilayah dapat melanggar peraturan negara, tetapi situasi ini tidak berarti melanggar hukum internasional. Terkait dengan Memorandum Budapest di tahun 1994, Rusia menganggap tidak melanggar salah satu kewajibannya dalam Memorandum tersebut. Rusia berpendapat hilangnya keutuhan wilayah Ukraina di Krimea menjadi akibat dari berbagai proses internal yang rumit dan tidak ada sangkut pautnya dengan Rusia dan kewajibannya sesuai dengan Memorandum Budapest. Hal itu karena Pemerintah Kiev mendapatkan kekuasaannya melalui kudeta inkonstitusional, khususnya mengenai etnis minoritas, telah merobek kesatuan Ukraina dan mengancam daerah yang tidak sejalan dengan Kiev—dalam hal ini wilayah Krimea. Revolusi *Euromaidan* yang sukses merebut rezim kekuasaan sebagian besar terdiri dari kudeta masyarakat Ukraina bagian Barat

2.6. Respon Poros Barat Terhadap Ketidakstabilan Ukraina

Pembatalan penandatanganan *Ukraine–European Union Association Agreement* oleh Viktor Yanukovych di tahun 2014 mendapat pertentangan keras dari mayoritas masyarakat Ukraina kala itu yang memiliki pola pikir perubahan, tentunya dalam hal ini mereka ingin melepaskan diri dari bayang-bayang pengaruh Rusia pada intinya dan menjalin aliansi baru dengan poros Barat. Mayoritas masyarakat kala itu beranggapan bahwa menjalin hubungan kerjasama dengan poros Barat melalui Uni Eropa, NATO, ataupun aliansi poros Barat lainnya akan memodernisasikan serta memperbaiki kualitas hidup di Ukraina yang terbagi kedalam 4 (tiga) isu utama; ekonomi, sosial, politik, dan keamanan. Demonstrasi lahir sebagai bentuk ketidaksetujuan atas sikap Viktor Yanukovych. *Euromaidan* dimaknai sebagai momentum bagi masyarakat Ukraina yang tidak puas atas kinerja pemerintah dimana maraknya pelanggaran hak asasi manusia—termasuk kurangnya akuntabilitas atas pelanggaran hak asasi manusia dimasa lalu, kurangnya sistem peradilan yang merangkul masyarakat, korupsi, kesepakatan luar negeri yang berujung kerugian dan segala bentuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah Ukraina.

Meletusnya konflik internal Ukraina dalam memprakarsai sebuah revolusi pemerintahan yang baru. Peristiwa ini merupakan bentuk langsung atas ketidakpuasan masyarakat Ukraina terhadap sikap Presiden Ukraina yang menjabat kala itu; Viktor Yanukovych, dimana dalam sikap kepemimpinannya menolak untuk menandatangani perjanjian kesepakatan kerjasama yang tertuang dalam *Ukraine–European Union Association Agreement* pada pertemuan yang berlangsung di Vilnius, Lithuania tanggal 29 November 2013. Perjanjian tersebut merupakan kesepakatan antara Ukraina, Uni Eropa, EAEC (*European Atomic Energy Community*), beserta ke-28 negara anggota Uni Eropa¹ (Traynor & Grytsenko, 2013). Secara khusus, dampak yang akan diterima Ukraina apabila Viktor Yanukovych menandatangani *Ukraine–European Union Association Agreement* berkaitan dengan komitmen Ukraina untuk membentuk sinergitas berkelanjutan bersama pihak-pihak terlibat dalam kesepakatan yang teradaptasi melalui perubahan regulasi dan hukum domestik yang selaras dengan Uni Eropa—dimaknai sebagai proses mempererat hubungan dengan poros Barat.

Ukraine–European Union Association Agreement dalam peranannya berfungsi sebagai sarana pemerintah Ukraina untuk mengambil tindakan diluar kebiasaan (*out-of-ordinary-actions*), momentum ini tentunya akan membantu Ukraina untuk semakin dekat dengan proses pengintegrasian mereka dengan Uni Eropa, sehingga reformasi ekonomi-sosial-politik-budaya dan keamanan tercipta. Beberapa poin utama dari skema *Ukraine–European Union Association Agreement* tersebut berkaitan dengan; aspek ekonomi di bidang perdagangan bebas pada *Deep and Comprehensive Free Trade Areas*² (DCFTA), perundang-undangan terkait persamaan hak dan kewajiban kelas pekerja (*blue-collar worker*), keterangan bebas visa, pertukaran informasi dan bantuan di bidang keadilan dan keamanan dalam negeri, kerja sama dalam modernisasi infrastruktur pengelolaan energi dan sumber daya alam Ukraina, hingga akses Ukraina dalam Bank Investasi Eropa (Official Journal of the European Union, 2014: 5–6).

¹ Ke-28 negara anggota Uni Eropa terhitung sebelum peristiwa “Brexit”.

² *the Deep and Comprehensive Free Trade Areas* (DCFTA) dalam *European Union–Ukraine Association Agreement* adalah zona perdagangan bebas antara Uni Eropa dan Ukraina yang telah dinegosiasikan sejak tahun 2008. Kerangka konseptual dan ruang lingkup DCFTA di tahun 2008 didasari atas Studi Kelayakan tahun 2004 oleh *Centre for European Policy Studies* (Brussel), *Institut für Weltwirtschaft* (Kiel), *International Centre for Policy Studies* (Kiev). Studi tersebut menyatakan bahwa pasar yang lebih terbuka dan transparan serta didukung oleh iklim bisnis yang menguntungkan dan tata kelola yang baik diperlukan untuk membuat industri Ukraina lebih kompetitif, dan memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi (Lebih lanjut dapat dilihat: Shumylo-Tapiola, 2012: 6).

Dalam *Ukraine–European Union Association Agreement* Ukraina secara langsung diwajibkan untuk mereformasi kebijakan ekonomi dan juga sistem peradilanannya sehingga sejalan dengan hukum dan regulasi standar Uni Eropa. Dalam skema manajemen krisis, Uni Eropa melalui *Ukraine–European Union Association Agreement* mempromosikan konvergensi bertahap dalam *the Common Foreign and Security Policy (CFSP)*³ yang diintegrasikan dengan *the Common Security and Defence Policy (CSDP)*⁴ (Ibid.). Dengan terciptanya manajemen kerjasama yang fleksibel memungkinkan Uni Eropa untuk merespon dan mengambil tindakan tepat dalam menangani perkembangan geopolitik yang tidak terduga di Ukraina. Pengimplementasian kebijakan luar negeri Uni Eropa ini dapat dimaknai sebagai partisipasi aktif rekonsiliasi sebuah krisis yang terjadi di Ukraina secara langsung, mengingat unsur geopolitik yang masih hangat di wilayah ini.

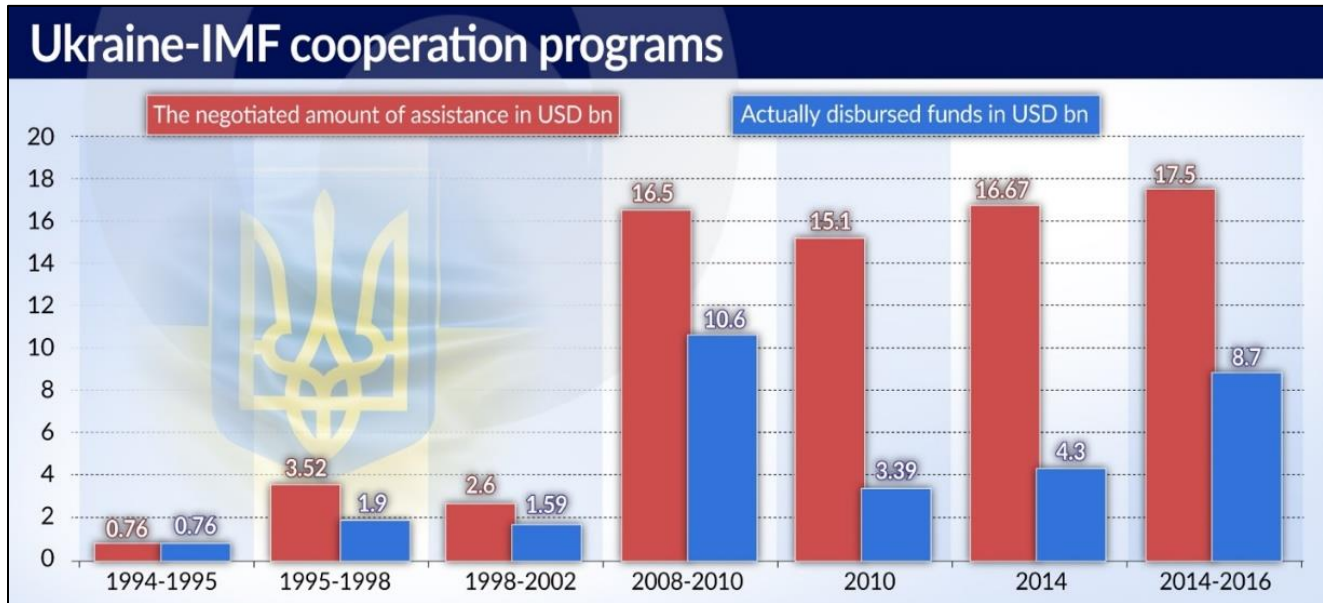
Tentunya, aliansi dapat tercipta ketika Ukraina mulai mengimplementasikan kebijakan yang ditawarkan Uni Eropa dalam *Ukraine–European Union Association Agreement*. Sehubungan dengan kondisi ini, pergerakan pengaruh Barat dalam mengembangkan pembangunan di Ukraina semakin santer terlihat, pemerintah Ukraina dituntut untuk menjalin kerja sama dengan poros Barat sebagai bentuk rekonstruksi krisis. Seiring dengan perubahan sikap Ukraina terhadap hubungan luar negeri mereka yang dipengaruhi oleh tuntutan masyarakat, kondisi ini direspon secara positif oleh blok negara-negara Barat. Penerapan skema Konsensus Washington⁵ diambil sebagai tindakan sekuritisasi pengaruh Rusia kedepannya.

³ *The Common Foreign and Security Policy (CFSP)* merupakan kebijakan luar negeri Uni Eropa yang melingkupi kerjasama dalam hubungan diplomasi. Secara lebih lanjut, objek dari CFSP berkaitan dengan misi Uni Eropa yang mencakup rekonsiliasi konflik, bantuan pendanaan terhadap negara-negara yang sedang dilanda krisis/konflik hingga penerjunan pasukan perdamaian (Lebih lanjut dapat dilihat: Legrand, 2020: 5).

⁴ *The Common Security and Defence Policy (CSDP)* merupakan komponen program CFSP Uni Eropa yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai aktor manajemen krisis yang secara khusus melibatkan bidang pertahanan/militeristik. Pasukan militer yang tergabung dalam CSDP berasal dari integrasi kolektif angkatan bersenjata nasional negara-negara anggota Uni Eropa. Menjaga perdamaian, pencegahan perluasan konflik, dan menjunjung keamanan internasional merupakan misi utama CSDP (Lebih lanjut dapat dilihat: Legrand, 2020: 4).

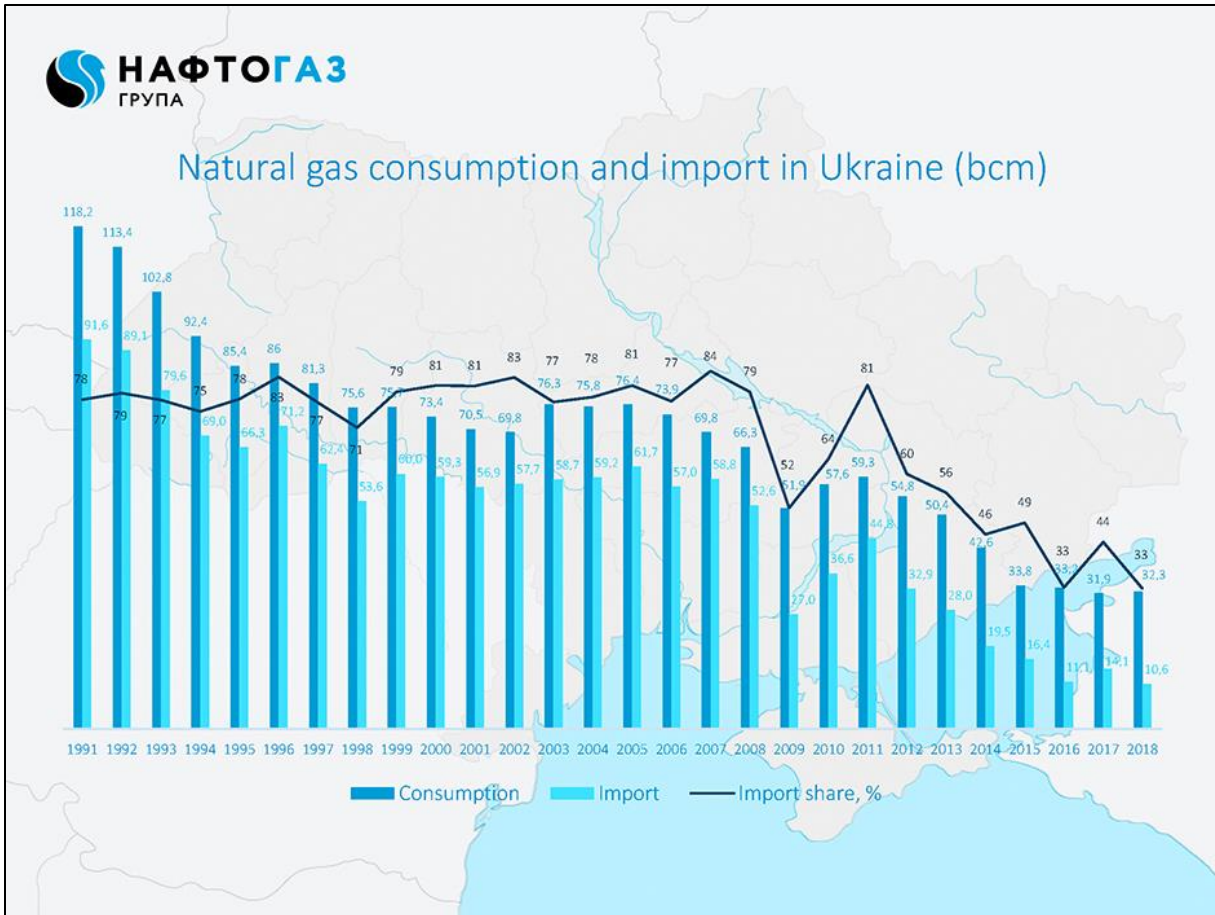
⁵ Konsensus Washington adalah sebuah sistem internasional yang berisi sepuluh poin referensi kebijakan bagi negara-negara yang mengalami krisis finansial luar biasa. Konsensus ini terlahir untuk mempromosikan pemulihan ekonomi terhadap negara-negara berkembang, negara-negara sedang dilanda konflik, ataupun negara gagal (*failed state*). Diprakarsai oleh tiga lembaga keuangan besar yang berada di Washington; *International Monetary Fund (IMF)*, *World Bank*, dan Kementerian Keuangan Amerika Serikat.

Pada awal tahun 2014, *International Monetary Fund* (IMF) mendukung pemerintah Ukraina dalam agenda reformasi ekonomi dalam negeri, hal ini ditunjukkan melalui pinjaman dana bantuan sebesar \$17 miliar yang dimaknai sebagai komitmen IMF dalam membentuk kerja sama dengan Ukraina. Selanjutnya sebagai salah satu pilar Konsensus Washington, *World Bank* melalui presidennya saat itu, Jim Yong Kim, setuju untuk menggelontorkan bantuan pinjaman sebesar \$3,5 miliar kepada Ukraina (Mittal & Moore, 2014: 3).



Grafik 1.5 Program Kooperasi IMF di Ukraina Rentang Waktu 1994–2016 (Sumber: Kozak, 2019)

Keterlibatan pengaruh Barat terhadap rekonstruksi kembali krisis yang terjadi di Ukraina secara aktif berlanjut pada bulan Maret 2014 ketika IMF bersedia untuk memberikan pinjaman lanjutan secara bertahap sebesar \$18 miliar dalam jangka waktu dua tahun (Erlanger & Herszenhorn, 2014). Secara perlahan, pengintegrasian Ukraina dalam rekonstruksi krisis mulai menunjukkan keberpihakan terhadap pengaruh Barat. Ukraina yang mengedepankan aliansinya dengan kekuatan Barat, di respon Rusia melalui sanksi ekonomi mandiri yang dijatuhkan terhadap Ukraina berkaitan dengan pemutusan dan perubahan kesepakatan dalam beberapa sektor perjanjian bilateral. Salah satunya yaitu pembatalan dana bantuan senilai \$15 miliar—kesepakatan yang ditawarkan Rusia di era Yanukovych dalam *Ukrainian–Russian Action Plan* pada 17 Desember 2013 silam, dan penetapan harga ekspor gas alam Ukraina melalui Gazprom sebesar \$485 per 1.000 meter kubik (ie. sebelumnya \$234 per 1.000 meter kubik apabila sesuai dengan Pakta Khakiv) (Mazneva & Krasnolutska, 2014).



Grafik 1.6 Konsumsi dan Impor Gas Alam di Ukraina Rentang Waktu 1991–2018 (Sumber: Eustream Slovakia, 2017)

Selain itu, Rusia juga mewajibkan Ukraina membayar hutang sebesar \$1,8 miliar yang terbagi dalam pembiayaan gas impor oleh Gazprom. Pembatalan kesepakatan dan diberlakukannya tarif tambahan dengan menetapkan nilai tukar hampir 50% dari harga ekspor gas oleh Kremlin, dinilai sebagai salah satu upaya Rusia dalam memberi respon terhadap kedekatan Ukraina dengan Barat yang semakin menghangat, respon tersebut cenderung sebuah isyarat bahwa keterlibatan Rusia dalam membangun Ukraina tidak dapat dipisahkan, pasalnya, Ukraina mengandalkan gas alam dalam sektor impor mereka. Sebagai upaya memandirikan pasokan gas alam Ukraina yang bergantung terhadap Rusia, Ukraina melalui perusahaan gas nasionalnya; Naftogaz dan Ukrtransgaz, pada bulan April 2014 menjalin nota kesepakatan dengan perusahaan nasional gas Slovakia; Eustream dan Perusahaan Snam milik Italia. Nota kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Menteri Pembangunan Italia, Carlo Calenda, Menteri Energi Ukraina, Ihor Nasalyk dan juga Miguel Arias Cañete sebagai perwakilan Komisi Eropa yang membawahi bidang Energi, Perubahan Iklim dan Lingkungan (Eustream Press, 2014).

Inisiasi tersebut didorong demi menjaga kualitas transmisi gas alam di Ukraina agar sesuai dengan standar pasar Eropa dan juga peningkatan sistem transmisi gas alam tersebut agar dapat beroperasi secara efisien, secara transparan, dan non-diskriminatif. Selain itu bagi Ukraina, menjalin nota kesepakatan dengan negara dalam aliansi Uni Eropa membantu stabilisasi konsumsi gas alam Ukraina yang sebelumnya terganggu akibat sanksi yang diberikan oleh Rusia melalui Gazprom. Melalui nota kesepakatan ini, Ukraina mengharapkan dukungan Uni Eropa sepenuhnya terkhusus ekspor sumber daya alam dari ‘Barat ke Timur’ sebagaimana akan menghilangkan keterlibatan Rusia yang menggunakan gas alam untuk mencapai tujuan politiknya di Ukraina. Kondisi ini dinilai memberikan ruang gerak bagi sekutu-sekutu Ukraina di Barat dalam menyebarkan *value* mereka. Politik internasional mencerminkan sebuah perjuangan kepentingan bagi negara. Dalam sistem politik internasional, negara-negara akan mengandalkan cara apapun untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Bagi Ukraina, komoditas gas alam memainkan peran penting dalam kesejahteraan bangsa, untuk itu, apabila sarana untuk mencapai komoditas ini terganggu, maka tidak ada pilihan lain selain menjalin aliansi baru yang lebih menguntungkan.

Isu kedekatan Ukraina dengan aliansi poros Barat lebih lanjut tercipta kedalam sikap hubungan luar negeri Ukraina, salah satunya dalam aspek militerisasi dimana melalui bantuan NATO, Ukraina dapat secara lebih baik membangun industri persenjataannya dan mengadakan latihan gabungan (*joint training*) dengan militer NATO (Carpenter, 2018), hingga pelatihan komunikasi strategis dan diplomasi publik kepada *Ukraine Crisis Media Centre* dan juga *Kyiv Post* sebagai bentuk pertahanan atas penyebaran propaganda Rusia. Upaya lainnya yang dilakukan Ukraina dalam mempersempit pengaruh Rusia di dalam negeri salah satunya dilakukan dengan memboikot penayangan stasiun televisi dan media lokal Rusia, sedikitnya ada 83 bentuk kebudayaan Rusia telah dimatikan peredarannya (BBC Press, 2016). Dalam segi kerohanian, Ukraina juga berhasil mendapatkan restu dari *Ecumenical Patriarchate of Constantinople*⁶, Bartholomeus I, untuk membentuk Gereja Ortodoks Ukraina yang independen dimana sebelumnya dibawah acuan Gereja Ortodoks Rusia.

⁶ *Ecumenical Patriarchate of Constantinople* atau Patriarkh Ekumenikal Konstantinopel berstatus sebagai *primus inter pares* dan merupakan pemimpin spiritual tertinggi bagi penganut ajaran Gereja Orthodox Timur.

Penandatanganan *tomos*⁷ dibawah Bartolomeus I secara langsung mengakhiri lebih dari 300 tahun lamanya kontrol agama Ukraina dibawah Rusia, menandakan terbentuknya emansipasi, kemerdekaan dalam sisi kerohanian, serta terbebas dari salah satu topik intervensi eksternal yang paling krusial (RFE/RL's Ukrainian Service, 2019).

⁷ Tomos adalah sebuah keputusan salah satu kepala yurisdiksi Gereja Ortodoks Timur yang berkaitan dengan hal-hal terkait yurisdiksi gereja ataupun putusan keagamaan lainnya (i.e. dalam kasus Ukraina keputusan dibuat oleh Uskup Agung Konstantinopel–Roma Baru; Patriarkh Ekumenikal Bartolomeus I).